

AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMIISSN: 2085-4633, Vol. 1 No. 2, Tahun 2021 Juli-Desember
Available online at <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DAN PENERAPAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Survei Pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan)****Muhammad Yamin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

Email: muhammadyamin@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to know the influence of the officer competence and the implementation of performance budgeting, on performance accountability of governmental institution. Survey the sum of 76 responders covering all head on duty, secretary on duty, lead on the area at 19 on agency of Bone South Celebes Province. Data have been collected by questioner. The tool of statistic analysis using path analysis. The result of this study indicates that the officer competence and the implementation of performance budgeting, have been significant influence, on performance accountability of governmental institution. It means that properly of performance accountability of governmental institution on agency of Bone South Celebes Province influenced by equal to 67,3%, and by equal to 33,7% influenced by other factors are not included into this study model.

Kata Kunci: Kompetensi; Penganggaran; Akuntabilitas.

A. Pendahuluan

Lima tahun sejak bergulirnya reformasi dibidang keuangan negara terkait dengan PP nomor 105 tahun 2000¹, ternyata kinerja dan akuntabilitas instansi

¹Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

pemerintah masih mendapatkan sorotan tajam pemerintah. Salah satu parameter yang menunjukkan hal ini adalah maraknya instansi pemerintah yang belum mampu menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja secara akuntabel.

Akuntabilitas (Accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban". Mengutip Douglas dalam Sugijanto, mohammad, menguraikan bahwa fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur yaitu: (1) Tersedianya informasi tentang keputusan/kebijakan dan tindakan diambil selama masa operasi organisasi, (2) Meminta pihak eksternal untuk mengkaji informasi tersebut, dan (3) Mengambil tindakan koreksi jika dibutuhkan².

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah termaktub bahwa, alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah melalui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, suatu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Selain itu pula, karakteristik laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, dapat dipahami, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi, lengkap dan memenuhi standar juga harus diperhatikan³.

Audit yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2006 atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) menemukan 2.260 rekening senilai Rp. 11,54 triliun yang perlu diterbitkan. Sedangkan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKD) Provinsi, Kabupaten/Kota menemukan terdapat aset senilai Rp. 17,06 triliun yang pengelolaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan BPK pada semester pertama tahun anggaran

²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 28

³Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2007 terhadap 76 departemen, lembaga negara dan badan yang memperlihatkan bahwa terdapat 31 diantaranya dinyatakan disclaimer oleh BPK⁴.

Data tersebut menunjukkan bahwa, masih adanya kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang meliputi penerapan an dan penggunaan anggaran negara yang tidak optimal dan tidak tepat sasaran, adanya kebocoran keuangan negara, masih belum efektifnya sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah, dan masih rendahnya kualitas penyajian laporan keuangan, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga BPK menolak memberikan pendapat.

Bontis mendefinisikan kompetensi sebagai hal yang melengkapi diri seseorang meliputi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan berinteraksi secara optimal dengan berbagai tuntutan pekerjaan. Kompetensi muncul dalam bentuk perilaku kerja, dan perilaku kerja efektif yang lahir dari kompetensi yang baik adalah dambaan dari setiap organisasi. Selain itu, kompetensi merupakan jembatan penghubung antara "*grand scenario*" organisasi (visi-misi-strategi-faktor kunci sukses) dengan *strategic human resources management*⁵.

Boyatzis karakteristik dasar seseorang yang menghasilkan kinerja yang efektif dan atau kinerja yang tinggi dalam suatu pekerjaan. Menurutnya kompetensi kerja merupakan representasi kemampuan menggambarkan kemampuan mereka atau

⁴BPK, Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Jakarta, 2007)

⁵Bontis, Dragonrtti, Jacobsen & Roos, *The Knowledge Toolnox; A Review Of The Tool Available To Measure And Manage Intangible Resources European Management Journal* 17 (4), 1999,h. 391=402

menggambarkan apa yang dapat mereka perbuat⁶.

Hasil penelitian Vichita dan Jintawee mengenai model kompetensi Spencer yang meliputi lima kompetensi utama yakni pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap dan perilaku spesifik mempengaruhi kinerja. Setidaknya hal tersebut terbukti ketika diimplementasikan oleh departemen pertanian Thailand untuk merespons kebijakan pemerintah terkait dengan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerjanya⁷. Xiao Hu Wang mengungkapkan hasil temuannya bahwa para pejabat di Florida umumnya sepakat mengenai kejelasan tujuan organisasi dan pengukuran kinerja yang memadai dilakukan oleh pejabat yang berkompeten sangat diperlukan dalam menerapkan penganggaran berorientasi kinerja secara efektif⁸.

Anggaran kinerja menurut GPRA adalah "*Performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to the taxpaying public by linking program funding to performance and production*". Selanjutnya *Government of Alberta, Canada* mendefinisikan anggaran kinerja sebagai "*..is a system of planning, budgeting, and evaluation that emphasizes the relationship between money budgeted and result expected*"⁹. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa anggaran kinerja disusun berdasar pada hasil yang ingin dicapai, dari setiap dana yang dikeluarkan sesuai harapan masyarakat. Sistem anggaran kinerja pada

⁶Boyatzis, R., *The Competent Manager : A Model For Effective Performance*, (New York: John Wiley & Sons, 1982), h. 128

⁷Vichita, And Jintawe, *Competency Requirements For Effective Job Performance In The Thai Public Sector; Contemporary Management Research Of Mahidol University*, Vol.3 No. 1, March, 2007, h. 45-70

⁸Xiao Hu Wang, *Conditions To Implement Outcome-Oriented Performance Budgeting: Some Empirical Evidence. Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Winter: 11,4; ABL/INFORM Global, 1999, h. 533

⁹GPRA, *Performance Budgeting; Past Initiatives Offers Insights For GPRA Implementation*, Washington, DC : Author, 1997

dasanya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Mark Crain dan Roark menyimpulkan hasil penelitiannya yang mengindikasikan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat menghemat alokasi biaya pada setiap program hingga 2 %, sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara efisien¹⁰. Fountain mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya harus memberikan informasi melalui publikasi laporan kinerja, laporan penyajian informasi kinerja yang juga disajikan dalam berbagai tingkatan. Serta laporan kinerja tersebut hendaknya merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak yang independen¹¹.

Dari hasil survei awal yang dilakukan terkait dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dinas pemerintah menurut sekretaris daerah Kabupaten Bone bahwa, Satuan Kerja perangkat daerah memiliki kesulitan dalam menentukan indikator kinerja terutama pada program yang bersifat non fisik yang diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, sehingga akuntabilitas kinerjanya juga menjadi kurang efektif dilakukan. Selain itu pula, pengukuran kinerja yang meliputi *input, output dan outcome*, belum dipahami secara menyeluruh oleh satuan kerja perangkat daerah. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam memenuhi akuntabilitas kinerjanya kepada *stakeholder*¹².

¹⁰Mark Crain W, Brian O Roark J, *The Impact Of Performance Based Budgeting On State Financial Performance*. Economic Government Journal, Virginia USA, 2004

¹¹Faustino Cordoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta; Penerbit ANDI Offsets, 2003), h. 127

¹²Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, 2010

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Seberapa besar pengaruh penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Terhadap akuntabilitas kinerja, melalui kompetensi aparatur pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui besaran pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui besaran pengaruh penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengetahui besaran pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Mengetahui besaran pengaruh penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui kompetensi aparatur pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Kerangka Pemikiran

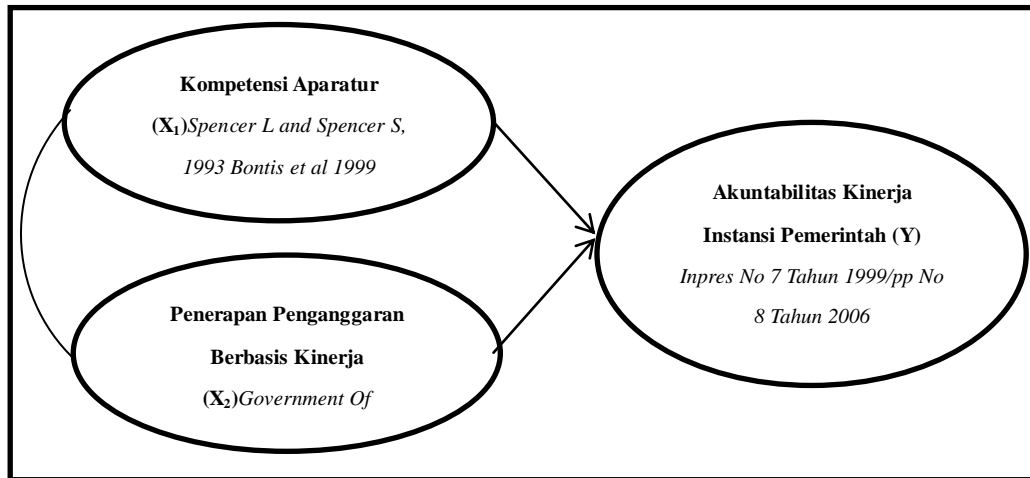
Scott menjelaskan bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan kesenjangan informasi (*asymetric information*) yang mana dalam praktek akuntabilitas keuangan terdapat hubungan yang jelas dan formal antara pemilik dan pengelola. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu mekanisme komunikasi antara pihak manajemen sebagai agent dengan pihak *capital supplier* sebagai *principa*¹³.

Konsep penganggaran diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misinya adalah melalui penganggaran berbasis kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja ini, juga telah diujikan yang diharapkan mampu mampu mengefisienkan anggaran pemerintah meskipun masih terdapat kelemahan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan organisasi pemerintah mulai dari penetapan visi dan misi, penyusunan program dan anggotana, penerapan hingga pelaporannya sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya, Teori kompetensi spencer menjelaskan tentang signifikansi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan diatas maka dapat digambarkan struktur penelitian sebagai berikut :

¹³Scott. Richard, John Page, Paul Hooper, *Auditing : A System Approach, Virginia* (Reston Publishing Co Inc-Prentice Hall, 1997), h. 2010

Gambar 1.3
Struktur Penelitian



E. Hipotesis

Berdasarkan struktur penelitian diatas maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penerapan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Penerapan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui kompetensi aparatur pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Disain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis melalui survei atas populasi yang datanya diperoleh dengan menggunakan kuesioner dalam skala likert. Penelitian ini menggunakan olahan statistik untuk menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan menggunakan model analisis jalur (*path analysis*). Dilihat dari horizon waktu penelitian ini bersifat *cross-sectional studies*. Metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan adalah dua metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan mengkaji teori dan penelitian terdahulu yang dianggap relevan hingga pada penentuan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan.

2. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Semua data yang diperoleh dari responden terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya agar dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diukur. Uji validitas penelitian ini menggunakan metode korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan metode *split half spearman-brown*. Harun Al-Rasyid, 1994, data yang diperoleh berskala ordinal kemudian ditransformasi ke dalam skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval*¹⁴. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat penggunaan metode analisis jalur.

3. Alat Analisis Data

Untuk meneliti hubungan diantara variabel eksogen terhadap variabel endogen

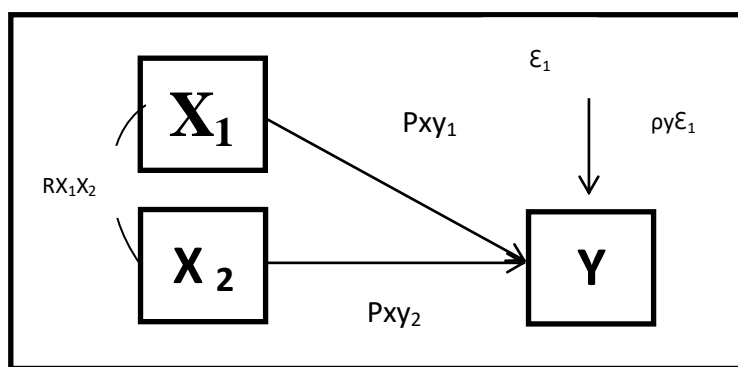
¹⁴ Harun Al. Rasyid, Diktat Kuliah: *Statistika Social*. (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1994), h. 98

dalam struktur penelitian, akan digunakan analisis jalur melalui bantuan program listrik 8.7 dengan persamaan jalur sebagai berikut:

$$Y = \rho_{YX_1}X_1 + \rho_{YX_2}X_2 + \epsilon_1$$

Adapun struktur penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Struktur Penelitian



G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan menggunakan software Lisrel Ver 8.7. Hasil perhitungan koefisien jalur pada persamaan struktural dan diagram struktur jalurnya sebagai berikut :

$$\text{LAKIP} = 0.424 (\text{Kompeten}) + 0.347 (\text{ABK}) \quad R^2 = 0.673 \quad \text{Errorvar.} = 0.327$$

2. Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi

Selatan.

Besarnya pengaruh secara langsung kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah $= pyx_1 \times pyx_1 = 0,424 \times 0,424 = 0,179$ (17,9%). Dari hasil perhitungan di atas diperoleh pengaruh langsung variabel kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 17,9%. Karena $pyx_1 > 0$, maka keputusannya H_0 ditolak. Besaran pengaruh tersebut dianggap lemah menurut kategori Guilford. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, berdampak langsung pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari responden terkait dimensi kompetensi yang meliputi pengetahuan, pengalaman, sikap, dan keterampilan menunjukkan bahwa, pengetahuan dan keterampilan aparatur Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan terkait sistem akuntansi dianggap kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dapat mereka tempuh karena beberapa faktor penghambat, seperti kurang disadarinya oleh pemerintah daerah akan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang dapat dibuktikan dengan rekrutmen tenaga akuntansi yang kurang diperhatikan, adanya ketidaktepatan dalam penentuan dan pelibatan peserta pendidikan atau pelatihan yang tidak terkait dengan tugas pokoknya dan cenderung mengikut sertakan aparat yang sama pada jenis pelatihan yang berbeda dengan bidang keahliannya.

Oleh karena itu, pembenahan sumber daya aparatur pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sudah seharusnya dengan

segera dilakukan, mulai dari proses rekrutmen aparatur yang berkompeten dengan bidang pekerjaan yang tersedia (porsi bidang akuntansi dan atau administrasi negara diperbanyak), pembinaan secara intensif aparatur disesuaikan dengan bidang keahliannya dan bukan serta penempatan mereka pada suatu jabatan dinas dengan melibatkan langsung mereka dalam pendidikan dan pelatihan sesuai bidang pekerjaannya, serta penempatan mereka pada suatu jabatan disesuaikan dengan bidang keahliannya dan bukan dominasi faktor politik dan atau bahkan faktor kekeluargaan. Cheng, pun dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa peran aparatur menyangkut kapasitas analitis sangat diperlukan¹⁵.

b. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja yakni $py \times 1. rX1.X2. py \times 2 = 0,424 \times 0,325 \times 0,347 = 0,048$ atau 4,8%. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh pengaruh tidak langsung variabel kompetensi aparatur melalui variabel penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan tambahan pengaruh sebesar 4,8%. Tambahan pengaruh tidak langsung kompetensi aparatur dengan diterapkannya penganggaran berbasis kinerja juga menunjukkan hal memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa, kompetensi yang dimiliki aparatur Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan saat ini masih

¹⁵Cheng, Rita H., John H Engstrom, Susan C Kattelus, Fall, *Educating Government Financial Managers. The Journal Of Government Financial Management. University Collaboration Between Business And Public Administration*, Alexandria : Vol 51, Isseues 3, 2002, h. 10

kurang memadai dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga akuntabilitas kerjanya pun dianggap belum maksimal dilakukan.

Total Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh sebesar $17,9\% + 4,8\% = 22,7\%$ yang menurut kategori Guilford dianggap berpengaruh lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur saat ini, masih belum optimal menopang pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini mendukung temuan BPK pada tahun 2007 lalu, yang mengungkapkan tentang rendahnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat maupun daerah sebagai akibat dari kurangnya kompetensi aparatur.

3. Pengaruh penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan melalui kompetensi aparatur pada Dine Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Besarnya pengaruh secara langsung penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut : $= r_{yx2} \times r_{yx2} = 0,347 \times 0,347 = 0,120$ atau 12,0%. Karena $r_{yx2} > 0$, maka keputusannya menolak H_0 . Dari hasil perhitungan di atas diperoleh pengaruh langsung variabel penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 12,0% dan menurut kategori Guilford berpengaruh sangat lemah. Hal ini berarti bahwa terlaksananya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kabupaten

Bone Provinsi Sulawesi Selatan juga dipengaruhi oleh penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Rencana kerja sebagai bagian tak terpisahkan dari penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dianggap telah dibuat dengan baik dan dapat dibuktikan pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tingkat pencapaian target program dan kegiatannya rata-rata 100 %. Meskipun tingkat pencapaian targetnya optimal seperti yang tertuang dalam LAKIP PEMDA, akan tetapi pencapaian tersebut belum dibarengi dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Hal inipun diakui oleh beberapa aparatur Dinas sebagai salah yang jelas. Xiao Hu Wang (1999) mengatakan bahwa pengukuran kinerja adalah elemen kunci dalam penganggaran kinerja oleh karena itu, kesulitan tersebut harus segera diatasi¹⁶.

Terbatasnya anggaran yang tersedia pada masing-masing menyulitkan mereka dalam membuat program dan kegiatan yang berkualitas. Sehingga menurut sebagian dari responden dengan terbatasan yang dimiliki mengakibatkan adanya kecenderungan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan hanya merupakan alat untuk menghabiskan anggaran semata. Kondisi tersebut juga mengakibatkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut salah satu responden bahwa, dalam pengalokasian anggaran untuk program bantuan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat masih bernuansa top down sehingga pemanfaatan bantuan yang

¹⁶Xiao Hu Wang, *Conditions To Implement Outcome-Oriented Performance Budgeting: Some Empirical Evidence. Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Winter: 11,4; ABL/INFORM Global, 1999, h. 533

disalurkan tersebut menjadi tidak optimal dan masyarakatpun merasa kurang puas dan hampir tidak merasakan adanya perubahan yang signifikan dengan adanya program bantuan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti menganggap bahwa hal ini juga harus menjadi bahan evaluasi yang serius buat pemerintah daerah dalam upaya keras untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dinas, sehingga setiap program yang dijalankan betul-betul dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pengaruh penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap pemerintah, melalui kompetensi aparatur yakni = $pyx - rX1.X2$. $pyx1 = 0,347 \times 0,325 \times 0,424 = 0,048$ atau 4,8%. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh pengaruh tidak langsung variabel penerapan penganggaran berbasis kinerja melalui variabel kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memberikan penambahan pengaruh sebesar 4,8%. Hal ini berarti bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat optimal bila didukung oleh sumber daya aparatur (kompetensi) yang berkualitas. Kurangnya kompetensi aparatur Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan pengaruh penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga menjadi kurang memadai.

Berdasarkan kondisi nyata pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diungkapkan oleh responden bahwa, pelatihan, seminar, dan workshop terkait dengan penganggaran berbasis kinerja naryaris tidak pernah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atau instansi yang berwenang untuk melakukan sosialisasi dan walaupun pernah dilakukan, para aparatur dinas tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Total Pengaruh (Pengaruh langsung dan tidak langsung) variabel

Penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperoleh sebesar $12.0\% + 4,8\% = 16,8\%$ dan menurut kategori Guilford berpengaruh sangat lemah. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur dan pengawasan fungsional mempengaruhi penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman sumber daya aparatur dinas tentang penganggaran berbasis kinerja menciptakan ketidakefektifan dalam penerapannya, sehingga hal tersebut pula berdampak pada penggunaan anggaran yang kurang efisien. Pengukuran kinerja sebagai bagian dari penganggaran bagi parker (1993), dapat meningkatkan akuntabilitas internal serta akuntabilitas publik.

Hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung yang diperoleh dengan menggunakan analisis jalur dengan bantuan lisrel 8.7 dapat dirangkum dalam tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4

Besarnya koefisien jalur kompetensi aparatur, penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Variabel	Koefisien Jalur ρ_{yx_i}	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tak Langsung	Total Pengaruh
Kompetensi Aparatur	0.424	17.9%	4.8%	22.7%
Penerapan ABK	0.347	12.0%	4.8%	16.8%
Total				39,5%

Pengaruh secara simultan kompetensi aparatur, penerapan

penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau nilai koefisiensi determinansi sebesar 67,3%, sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 39,5\%) = 60,5\%$ dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan pada kategori Guilford yang dikutip oleh Nur Indrianto bahwa pengaruh simultan tersebut dinyatakan berpengaruh kuat¹⁷.

Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kesadaran bagi setiap aparatur akan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang harus mereka peroleh terkait dengan persoalan akuntansi dan penganggaran kinerja. Meskipun pada akhirnya harus rela pada kondisi yang tidak kondusif terkait komitmen penataan dan peningkatan sumber daya aparatur yang dirasakan tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah. Ironisnya, Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pendidikan, pelatihan pun sangat terbatas dan termasuk seminar sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan sistem akuntansi dan penganggaran naryaris tidak pernah dilakukan.

Deangan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini mendukung hasil temuan BPK pada semester pertama tahun anggaran 2007 tentang laporan keuangan dan kinerja daerah yang dinyatakan *disclaimer*. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini senada dengan Harvey dan Brown yang menegaskan bahwa sumber daya manusia dapat menggunakan seluruh kemampuan bagi efektifitas oeganisasi. Karenanya, organisasi yang akan berhasil pada masa yang akan datang hanyalah mereka yang mampu meningkatkan produktivitas melalui

¹⁷Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Motodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi 1 (Yogyakarta: BPPFE, 1999) h. 96

peningkatan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki. Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya¹⁸.

Kondisi sumber daya aparatur Dinas Kabupaten Bone Provisi Sulawesi Selatan yang berkompetensi rendah pada bidang akuntansi dan penganggaran, bila tidak ditingkatkan dengan segera maka dapat dipastikan bahwa akunatabilitas kinerja isntansi pemerintah dalam bentuk LAKIP tidak akan mampu diterbitkan pada tingkat satuan kerja perangkat daerah.

H. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, serta analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan adanya penerapan penganggaran berbasis kinerja termasuk lemah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, tidak tersedianya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dipengaruhi oleh lemahnya kompetensi aparatur terkait pengetahuan dan keterampilannya dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja dan pengawasan fungsional. Oleh karena itu, diharapkan upaya peningkatan kompetensi aparatur dengan serius dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan menjadi amat penting dilakukan.
2. Pengaruh penerapan penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instnasi pemerintah, melalui kompetensi aparatur termasuk sangat

¹⁸Harvey And Hervey D.R. Brown, *Manajemen Human Resoureces, Productivity, Quality Of Work Life, Profit. Third Edition.* (Mc. Grawhill Inc. 1995), h. 294

lemah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, tidak tersedianya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dipengaruhi oleh penerapan penganggaran berbasis kinerja yang belum optimal sebagai akibat dari lemahnya kompetensi aparatur dan belum optimalnya pengawasan fungsional.

3. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui kompetensi aparatur dan penerapan penganggaran berbasis kinerja termasuk Jemah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, tidak tersedianya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan pengawasan fungsional terkait kompetensi aparatur dan penerapan penganggaran berbasis kinerja.
4. Pengaruh kompetensi aparatur, penerapan penganggaran berbasis kinerja, dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dianggap kuat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, tidak tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas kabupaten Bone, sangat dipengaruhi, oleh lemahnya kompetensi aparatur, belum optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja, serta belum optimalnya pengawasan fungsional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diajukan saran untuk pengembangan ilmu serta saran guna laksana (praktis) sebagai berikut :

1. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengungkap secara mendalam mengenai dampak pengetahuan dan keterampilan terhadap penyusunan dan penerbitan

LAKIP pada dinas kabupaten Bone. Faktor penyebab utama kurangnya penerapan penganggaran berbasis kinerja di dinas kabupaten Bone. Serta kendala pengawasan fungsional di kabupaten Bone. Subjek penelitian diperluas dan atau melibatkan semua satuan kerja perangkat daerah selaku entitas instansi yang diwajibkan menyusun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Saran guna laksana (praktis) adalah 1). Pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan dan pembinaan secara intensif terhadap sumber daya aparatur di Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. 2). Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di dinas maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya di kabupaten Bone. 3). Menerapkan secara konsisten peraturan daerah mengenai organisasi dan mekanisme kerja yang berlaku, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam tatanan kerja organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bontis, Dragonrtti, Jacobsen & Roos, *The Knowledge Toolnox; A Review Of The Tool Available To Measure And Manage Intangible Resources European Management Journal* 17 (4), 1999
- Boyatzis, R., *The Competent Manager : A Model For Effective Performance*, New York: John Wiley & Sons, 1982
- BPK, Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta, 2007
- Cheng, Rita H., John H Engstrom, Susan C Kattelus, Fall, *Educating Government Financial Managers. The Journal Of Government Financial Management. University Collaboration Between Business And Public Administration*, Alexandria : Vol 51, Isseues 3, 2002
- Data Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, 2010
- Faustino Cordoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta; Penerbit ANDI Offsets, 2003
- GPRA, *Performance Bidgeting; Past Initiatives Offers Insinghts For GPRA Implementation*, Washington, DC : Author, 1997
- Harun Al. Rasyid, Diktat Kuliah: *Statistika Social*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1994
- Harvey And Hervey D.R. Brown, *Manajemen Human Resoureces, Productivity, Quality Of Work Life, Profit. Third Edition*. Mc. Grawhill Inc. 1995
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mark Crain W, Brian O Roark J, *The Impact Of Performance Based Budgeting On State Financial Performance*. Economic Government Journal, Virginia USA, 2004

Muhammad Yamin

Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2001

Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Motodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi 1 Yogyakarta: BPPFE, 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022

Scott. Richard, John Page, Paul Hooper, *Auditing : A System Approach*, Virginia Reston Publishing Co Inc-Prentice Hall, 1997

Vichita, And Jintawe, *Competency Requirements For Effective Job Performance In The Thai Public Sector, Contemporary Management Research Of Mahidol University*, Vol.3 No. 1, March, 2007

Xiao Hu Wang, Conditions To Implement Outcome-Oriented *Performance Budgeting: Some Empirical Evidence. Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Winter: 11,4; ABL/INFORM Global, 1999

Xiao Hu Wang, Conditions To Implement Outcome-Oriented *Performance Budgeting: Some Empirical Evidence. Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Winter: 11,4; ABL/INFORM Global, 1999